

NEGARA DAN PENDIDIKAN ISLAM DI INDONESIA

Moh. Ismail

Universitas Sunan Giri Surabaya

Email: mohismail09@gmail.com

Abstrak

Pendidikan Islam hadir sebagai wadah pendidikan dan latihan pembentukan karakter. Dalam pesantren, pendidikan Islam melakukan upaya pembentukan moral anak didik menjadi lebih dinamis. Berdasarkan perkembangan pendidikan Islam di bumi pertiwi, pemerintah sebagai penyelenggara Negara berupaya melakukan penataan system dan metode pembelajaran. Masa penjajahan Belanda dan Jepang hingga masa reformasi, pendidikan Islam telah terselenggara oleh masyarakat melalui pesantren, sekolah madrasah diniyah dan tempat-tempat pendidikan Islam lainnya. Pemerintah era reformasi melakukan pembenahan terhadap pembelajaran Pendidikan Islam, dikarenakan perlunya penanaman agama sedari kecil. Pemerintah memandang bahwa, agama mempunyai kedudukan dan peranan sangat penting dan strategis dalam pelaksanaan pengembangan suatu Negara. Sehingga, terdapat beberapa usaha yang dilakukan pengelola Negara yang dalam hal ini adalah pemerintah yakni dengan memberikan bantuan terhadap lembaga-lembaga pendidikan sebagaimana yang dianjurkan oleh Badan Pekerja Komite Nasional Pusat (BPKNP) 27 Desember 1945. Artikel ini mencoba untuk menelusuri seberapa besar peran pemerintah masa reformasi pada Pendidikan Islam. Sudahkah pemerintah memberikan peluang yang lebih besar lagi pada lembaga pendidikan Islam. Karena peran lembaga pendidikan Islam pada masa ini mempunyai peran dan kedudukan yang sama dengan sekolah pada umumnya.

Kata kunci: Pendidikan Islam, Orde Lama, Orde Baru, Reformasi

Abstract

Islamic education exists as a forum for character building education and training. In Islamic boarding schools, Islamic education makes efforts to form students' morals to become more dynamic. Based on the development of Islamic education in the motherland, the government as the organizer of the State seeks to organize learning systems and methods. During the Dutch and Japanese colonial times until the reformation period, Islamic education was carried out by the community through Islamic boarding schools, madrasah diniyah schools and other places of Islamic education. The government of the reform era made improvements to the learning of Islamic education, due to the need to instill religion from a young age. The government views that religion has a very important and strategic position and role in the implementation of the development of a country. Thus, there are several efforts made by State managers, which in this case is the government, namely by providing assistance to educational institutions as recommended by the Working Body of the Central National Committee (BPKNP) December 27, 1945. This article tries to explore how big the role of the government during the reformation period was in Islamic education. Has the government provided even greater opportunities for Islamic educational institutions? Because the role of Islamic educational institutions at this time has the same role and position as schools in general.

Keywords: Islamic Education, Old Order, New Order, Reform

Pendahuluan

Keberadaan pendidikan Islam di Indonesia sudah berlangsung sejak lama. Pada masa penjajahan Belanda dan

Jepang, pendidikan Islam diselenggarakan oleh masyarakat dengan mendirikan pesantren, sekolah dan tempat - tempat pendidikan dan

latihan . Setelah merdeka, pendidikan Islam dengan ciri khasnya yang berbentuk madrasah dan pesantren mulai mendapatkan perhatian dan pembinaan dari pemerintah Republik di Indonesia. Dari beberapa dekade pemerintahan, seperti orde lama, orde baru hingga orde reformasi.

Pemerintahan pada masa orde lama yang dimaksudkan, adalah rentang waktu 1945 sampai dengan 1965, yang diberi tugas oleh UUD 1945 untuk mengusahakan agar terbentuknya suatu sistem pendidikan dan pengajaran yang bersifat Nasional. Oleh karena itu, pemerintah orde lama, telah memberikan sumbangsih yang cukup signifikan terhadap perkembangan pendidikan Islam pada masa itu. Pasalnya, pemerintahan memandang bahwa, agama mempunyai kedudukan dan peranan sangat penting dan strategis dalam pelaksanaan pengembangan suatu Negara. Sehingga, terdapat beberapa usaha yang dilakukan pengelola Negara yang dalam hal ini adalah pemerintah yang di antaranya adalah dengan memberikan bantuan terhadap lembaga-lembaga pendidikan sebagaimana yang dianjurkan oleh Badan Pekerja Komite Nasional Pusat (BPKNP) 27 Desember 1945.

Hal tersebut diperkuat lagi dengan berbagai kebijakan Pemerintah Republik Indonesia dalam Bidang Pendidikan Islam antara lain yaitu:

1. Pada tanggal 17-8-1945 Indonesia merdeka. Tetapi musuh-musuh

Indonesia tidak diam saja, bahkan berusaha untuk menjajah kembali. Pada bulan oktober 1945 para ulama di Jawa memproklamasikan perang jihad *fi sabilillah* terhadap Belanda/Sekutu.

2. Pada tanggal 3 Januari 1946 dibentuk Departemen Agama, di mana tugasnya mengurus penyelenggaraan pendidikan agama di sekolah umum dan mengurus sekolah Agama, seperti Pondok Pesantren dan Madrasah.
3. Pada bulan desember 1946 dikeluarkan peraturan bersama dua menteri, yaitu Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Pengajaran yang menetapkan bahwa pendidikan agama diberikan mulai kelas IV SR (Sekolah Rakyat = Sekolah Dasar) sampai kelas VI.

Hal tersebut dilanjutkan pada masa berikutnya, yaitu asa orde baru, masa ini dimulai sejak 11 Maret 1966 hingga terjadinya peralihan kepresidenan, dari Presiden Soeharto ke Presiden Habibie pada 21 Mei 1998. Pada awal masa pemerintahan orde baru ini, kebijakan tentang pendidikan Islam yang dalam hal ini adalah lembaga madrasah, bersifat melanjutkan dan meningkatkan kebijakan orde lama. Pada tahap ini madrasah belum di pandang sebagai bagian dari sistem pendidikan Nasional, akan tetapi baru bersifat lembaga pendidikan bersifat otonom di bawah pengawasan menteri Agama.

Sehingga, pemerintah mengambil beberapa langkah untuk dilakukan, yang salah satunya adalah dikeluarkannya kebijakan pemerintah pada tahun 1967, yang berfungsi sebagai respons yang positif terhadap TAP MPRS No. XXVII tahun 1966. Dan pada dekade 1970-an madrasah terus dikembangkan untuk memperkuat keberadaannya. Pemerintah kemudian menegaskan kembali tujuan dan cita-cita pendidikan Nasional dengan dikeluarkannya TAP MPR No.II/MPR/1988 dan UU Sistem Pendidikan Nasional, No. 2 tahun 1989.

Hal tersebut kemudian dilanjutkan lagi pada masa reformasi. Pada masa ini, pemerintah memberikan peluang yang lebih besar lagi pada lembaga pendidikan Islam. Pasalnya, lembaga pendidikan Islam pada masa ini mempunyai peran dan kedudukan yang sama dengan sekolah pada umumnya. Hal ini, kemudian diperkuat lagi dengan ditetapkannya undang-undang tentang guru dan dosen pada tahun 2003 yang didalamnya juga telah membahas pendidikan Islam.

Metode Penelitian

Metode dan jenis pengumpulan data dalam penelitian adalah dengan studi pustaka (library reseach) dengan mengumpulkan buku-buku, jurnal dan hasil penelitian terdahulu yang mendukung tema penelitian, diantaranya literatur tentang Negara dan Pendidikan Islam yang mencakup Pendidikan Islam, Orde Lama, Orde

Baru, Reformasi. Library research mengintegrasikan data secara deskripsi analisis. Teknik analisis data penelitian menggunakan pendekatan deskriptif analisis.

Tahapan dimulai dengan melakukan reduksi data dari sumber kepustakaan, kemudian mengorganisasi dan memaparkan data, melakukan verifikasi kemudian diakhiri dengan menyimpulkan data untuk menjawab rumusan masalah (Masrukhin, 2015: 45).

Hasil dan Pembahasan

Pandangan Negara terhadap Pendidikan Islam

Negara adalah suatu wilayah di permukaan bumi, yang kekuasaannya meliputi politik, militer, ekonomi, sosial-budaya, hingga pengaturan dan pelaksanaan pendidikan. Semua yang menyangkut aktivitas masyarakat dalam suatu Negara tersebut, diatur dan ditetapkan oleh kepala Negara yang berada di wilayah tersebut (Sjacrhan, 2007: 33). Negara adalah organisasi politik dari kekuasaan politik, sehingga Negara merupakan bentuk organisasi dari masyarakat atau kelompok masyarakat yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur hubungan, dengan cara menyelenggarakan ketertiban dan menetapkan tujuan-tujuan dari kehidupan bersama, termasuk didalamnya adalah unsur pendidikan.

Pendidikan Islam di Indonesia telah berlangsung cukup lama, menurut penuturan sejarah, masuknya Islam ke Indonesia, mereka masuk dengan damai,

dengan melalui beberapa kultur, seperti perdagangan, perkawinan dan bahkan pendidikan (Haidar, 2004: 3).

Pemaknaan dari pendidikan Islam itu sendiri, adalah kegiatan pengajaran dengan sasaran utamanya adalah untuk memberikan pengetahuan ke-Islaman dan menanamkan sikap hidup beragama kepada peserta didik (KBBI, 2000: 153). Sedangkan pengertian pendidikan Islam itu sendiri, menurut Athiyah al-Abbasyi berpendapat bahwa, yang dimaksud dengan pendidikan Islam adalah bukan hanya mengisi otak anak dengan segala macam ilmu yang belum mereka ketahui. Akan tetapi untuk mendidik akhlak dan jiwa mereka, serta menanamkan rasa ke utamaan (*fadilah*), dan membiasakan mereka dengan kesopanan yang tinggi dan mempersiapkan mereka untuk suatu kehidupan yang suci seluruhnya, ikhlas dan jujur (Athiyah, 1974: 15).

Di Indonesia sendiri, lembaga pendidikan Islam berkembang dengan berbagai macam ragam, yang di antaranya adalah *Madrasah* (Maksum, 1999:8), *Pesantren* (Munawwir, 1999: 564), *Dayah*, *Rangrang*, dan *Surau* dan lain sebagainya. Beberapa nama lembaga pendidikan tersebut, merupakan lembaga pendidikan yang dikenal di Negara Indonesia (Arief, 2012: 10). Terdapat banyak sekali kajian terkait dengan lembaga-lembaga pendidikan Islam tersebut yang dilakukan oleh para kalangan sarjana. Terlepas dari perspektif yang ditawarkan dalam studi-

studi tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa lembaga pendidikan Islam merupakan *khazanah* Islam Indonesia, yang masing telah memainkan peranannya, dan mampu untuk memberikan kontribusi yang positif terhadap pelaksanaan kebijakan Negara. Untuk melaksanakan tugas pembentukan generasi yang berkualitas baik dan berkarakter, dan semua itu sesuai dengan karakteristik masing-masing lembaga pendidikan Islam tersebut.

Respon positif Negara, terhadap eksistensi lembaga pendidikan Islam, merupakan suatu peluang besar bagi para penyelenggara dan pelaksana lembaga pendidikan Islam, untuk dapat mengembangkan lembaga pendidikan Islam pada arah yang lebih baik, respon positif pemerintah, sebagaimana telah disepakatinya SKB tiga menteri (Muhaimin, 2003: 176), yang tujuannya adalah untuk mensejajarkan lembaga pendidikan Islam dengan lembaga pendidikan umum, dengan menawarkan porsi muatan kurikulum masing-masing 70% berisi muatan pelajaran umum, dan porsi 30% berisi muatan pelajaran agama. Walaupun demikian, problematika pengembangan lembaga pendidikan Islam masih cukup menuai beberapa persoalan yang kemudian menuntut pemerintah dan juga pengelola serta pelaksana pendidikan Islam itu sendiri, untuk lebih keras lagi berusaha untuk meminimalisir persoalan yang dihadapi oleh pendidikan Islam. Persoalan-persoalan yang muncul dalam

pendidikan Islam tersebut diantaranya adalah:

1. Pemahaman SKB tiga menteri tersebut yang hanya difahami secara simbolik oleh para pelaksana pendidikan Islam, sehingga 70% pelajaran umum dan 30% pelajaran agama masih belum terlaksana dengan sepenuhnya,
2. Banyak para lulusan madrasah yang tidak sesuai dengan yang dicanangkan, mereka tidak mempunyai kompetensi yang bagus dalam bidang pelajaran umum dan juga dalam bidang agama, mereka hanya akan menjadi lulusan yang serba tanggung dan tidak menyeluruh.

Melihat persoalan yang demikian, maka pemerintah menawarkan solusi alternative yang lain, yaitu dengan merumuskan sekolah keagamaan yang kemudian dikenal dengan istilah (MAPK) atau Madrasah Aliyah Program Khusus. Selain itu, pemerintah juga menaruh perhatian yang khusus terhadap perkembangan lembaga pendidikan Islam. Hal tersebut diimplementasikan pemerintah dalam bentuk pelaksanaan kegiatan peningkatan mutu pendidikan madrasah dalam konteks pendidikan Nasional. Terdapat beberapa hal yang dilakukan pemerintah yang diantaranya adalah dengan menyatakan:

1. Ijazah madrasah dapat mempunyai nilai yang sama dengan ijazah sekolah umum yang setingkat,

2. Lulusan madrasah dapat melanjutkan ke sekolah umum yang stingkat lebih atas,
3. Siswa madrasah dapat berpindah ke sekolah umum yang setingkat (Muhaimin, 2003: 176).

Pendidikan Islam dari Masa ke Masa

1. Pendidikan Islam pada Masa Orde Lama

Pendidikan Islam pada masa orde lama ini, jika merujuk kepada sejarah. Maka secara umum masih dapat dikatakan bahwa, keadaan pendidikan Islam masih belum mendapatkan perhatian yang lebih dari pemerintah, dan pemerintah kurang sungguh-sungguh dari pemerintah. Hal tersebut tentunya disebabkan dominasi pergolakan politik antara pemerintah sebagai pengatur dan pelaksana Negara dengan elit Islam. Sehingga menimbulkan saling kecurigaan antara pemerintah dengan elit Islam yang kemudian menyebabkan pemerintah merasa setengah hati untuk mengurusnya.

Namun berkat usaha para elit muslim yang berpandangan progresif, modern dan nasionalis, terutama oleh masyarakat muslim yang telah tersentuh oleh pendidikan dari Negara yang lebih maju, maka mereka melakukan komunikasi sehingga akhirnya visi, misi dan tujuan pendidikan Islam menjadi selaras dengan kebutuhan pemerintah. Akhirnya pemerintah membentuk lembaga pemerintah yang mengurus

bidang keagamaan dan pendidikan Agama beserta beberapa peraturan pemerintah terkait dengan hal tersebut.

2. Pendidikan Islam pada Masa Orde Baru

Pada dasarnya seluruh kebijakan yang terlahir pada zaman orde baru, diarahkan untuk menopang kebijakan pembangunan dan stabilitas ekonomi kerakyatan Indonesia. Namun pada kenyataannya, pendidikan Islam pada masa orde baru ini, sedikit demi sedikit, eksistensi lembaga pendidikan Islam mulai mendapatkan porsi yang lebih serius dari pemerintah.

Hal tersebut terlihat dari lahirnya SKB 3 menteri tersebut, sehingga antara lulusan pendidikan Islam dan lulusan lembaga pendidikan umum mempunyai hak yang sama. Kemudian yang kedua bisa dilihat dari terjadinya pembaharuan lembaga pendidikan Islam, yang dalam hal ini adalah madrasah dan pesantren dan lain sebagainya. Dan yang ketiga adalah adanya pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah kepada lembaga pendidikan Islam nonformal dan lain sebagainya.

Dan yang ketiga adalah adanya pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah kepada lembaga pendidikan Islam nonformal dan lain sebagainya.

3. Pendidikan Islam pada Masa Reformasi

Keadaan lembaga pendidikan Islam pada masa reformasi menjadi lebih baik dari masa-masa sebelumnya (Fatih Rusydi, 2022). Hal tersebut dapat terlihat dari beberapa hal yang di antaranya adalah:

- a. Kebijakan tentang pemantapan pendidikan Islam sebagai bagian dari system pendidikan nasional
- b. Kebijakan tentang peningkatan anggaran pendidikan Islam
- c. Program wajib belajar Sembilan tahun
- d. Penyelenggaraan sekolah bertaraf nasional
- e. Adanya kebijakan sertifikasi guru dan dosen yang berlaku kepada semua pelaksana pendidikan, baik negeri maupun swasta dan lain sebagainya (Abuddin Nata, 2011: 321).

Kondisi Objektif Pendidikan Islam dan Masa Depan di Indonesia

Praktek pendidikan Islam di Indonesia ini sebagaimana dijelaskan di atas, mereka mengalami pasang surut dari waktu ke waktu, dari masa pemerintahan orde lama. Kemudian dilanjutkan pada periode masa orde baru, dan bahkan pada masa orde reformasi yang terjadi di akhir-akhir ini. Namun demikian, dalam perkembangan terakhir, realitas lembaga pendidikan Islam menunjukkan kondisi wajah yang berbeda dari kondisi yang sebelumnya (Fatih Rusydi, 2018), salah satu indikatornya adalah jika dilihat dari sisi

kuantitasnya yang semakin tahun, semakin mengalami penambahan jumlah kuantitas lembaga pendidikan Islam di Indonesia ini.

Hal tersebut, ditambah lagi dengan ditambahkannya mata pelajaran agama pada jenjang lembaga pendidikan umum. Bahkan bukan hanya itu, terdapat beberapa lembaga pendidikan umum yang mencanangkan dan memprogramkan pelaksanaan pondok kilat yang tujuannya adalah untuk lebih meningkatkan lagi pelaksanaan dan pemahaman para siswa terhadap pendidikan Islam.

Strategi lainnya dilaksanakan dalam penyempurnaan kurikulum pendidikan Agama secara terus menerus yang dilakukan oleh lembaga pendidikan umum. Sehingga pelaksanaan pendidikan agama pada sekolah umum lebih proporsional dan fungsional (Husni Rahim, 2001: 12).

Berpijak dari kondisi yang demikian, maka masa pendidikan Islam di Indonesia tersebut ditentukan oleh dua faktor, yang di antaranya adalah faktor Internal dan faktor eksternal lembaga pendidikan Islam itu sendiri. Selain itu, isu demokratisasi lembaga pendidikan Islam juga dapat mempengaruhi masa depan pendidikan Islam di Indonesia. Dengan demikian, Negara yang dalam hal ini adalah pemerintah, mempunyai andil yang cukup kuat, bagaimana seharusnya yang dilakukan oleh lembaga pendidikan Islam, agar mereka

dapat memerankan perannya di dalam kancah Negara.

Eksistensi Pendidikan Islam Sebagai Modal Pembangunan Nasional

Secara historis, eksistensi lembaga pendidikan Islam yang dalam hal ini adalah pesantren dan madrasah, hampir bersamaan dengan masuknya Islam ke Indonesia. Alasannya sangat sederhana. Islam, sebagai agama dakwah yang disebarkan secara efektif melalui proses transformasi ilmu dari para ulama kepada para masyarakat (*tarbiyah wa ta'lim*, atau *ta'dib*), dalam konteks ke Indonesiaan maka tentu proses ini berlangsung melalui lembaga pendidikan pesantren (Fatih Rusydi, 2021).

Secara bahasa, pesantren tidak sepenuhnya merujuk pada kata dalam bahasa Arab. Sebutan untuk pelajar yang mencari ilmu, bukan *murid* seperti dalam tradisi sufi, *thalib* atau *tilmidh* seperti dalam bahasa Arab (Fatih Rusydi, 2019). Akan tetapi santri yang berasal dari bahasa Sanskerta. *San* berarti orang baik, dan *tra* berarti yang suka menolong. Dan lembaga tempat belajar itu pun kemudian mengikuti akar kata santri dan menjadi pe-santri-an atau "pesantren".

Jadi, ada empat ciri utama dalam pesantren pesantren tersebut yang *Pertama*, pondok harus berbentuk asrama. *Kedua*, kiai sebagai sentral figur yang berfungsi sebagai guru, pendidik, dan pembimbing. *Ketiga*, masjid sebagai pusat kegiatan. Dan *Keempat*, materi

yang diajarkan tidak terbatas kepada kitab kuning saja. Menurut Dr. Hamid Fahmy Zarkasyi, Penulis Peneliti di *Institute for the Study of Islamic Thought and Civilization* (INSIST), dengan caturpusat inilah, pendidikan pesantren berfungsi sebagai “*melting pot*”, yaitu tempat untuk mengolah potensi-potensi dalam diri santri agar dapat berproses menjadi manusia seutuhnya (*insan kamil*).

Dengan demikian, karakter pendidikan pesantren bersifat holistik. Artinya, seluruh potensi pikir dan zikir, rasa dan karsa, jiwa dan raga dikembangkan melalui berbagai media pendidikan yang terbentuk dalam suatu komunitas yang sengaja didesain secara integral untuk tujuan pendidikan. Di tengah gencarnya kampanye pendidikan berkarakter, pesantren justru sejak dari awal sudah menerapkannya. Tujuan pendidikan pesantren seperti halnya tujuan kehidupan manusia di dunia ini, yang di antaranya adalah santri tidak hanya disiapkan untuk mengejar kehidupan dunia, akan tetapi juga mempersiapkan kehidupan di akhirat.

Di sisi lain, saat ini sedang banyak dikembangkan sekolah-sekolah yang diberi label Sekolah Berstandar Internasional (SBI). Akan tetapi jika kita melihatnya lebih dekat, sekolah-sekolah dengan label internasional tersebut hanyalah sekolah yang bertarif mahal (internasional), dan bukan sekolah yang berbahasa Inggris. Sekolah berstandar internasional yang sedang dirintis

pemerintah juga dievaluasi dengan ujian nasional.

Jika Anda ingin melihat sekolah berstandar internasional. Eksistensi Pondok Modern Gontor adalah salah satu bukti konkretnya. Tidak hanya santri wajib berbahasa Arab dan Inggris, Gontor juga mampu menarik siswa dari luar Negeri, seperti Malaysia, Thailand, Singapura, Brunai Darussalam, Jepang, Amerika Serikat, Australia, dan berbagai Negara lainnya. Inilah sekolah bertaraf internasional, walaupun tanpa label sekolah internasional.

Bahkan, jauh sebelum Indonesia merdeka, dan jauh sebelum sistem pendidikannya mapan, pesantren dan para alumni-alumninya telah banyak berperan baik di nusantara, maupun kancan dunia. Pada abad ke-17 hingga awal abad ke-19, tercatat nama-nama sekaliber Nuruddin Ar-Raniri, Hamzah al-Fansuri, Abdul Rauf al-Sinkili, Syekh Yusuf al-Makassari, Abdussamad al-Falimbani, Khatib Minangkabawi, Nawawi al-Bantani, Muhammad Arsyad al-Banjari, dan lain-lain. Sosok-sosok alumni pesantren dan Timur-Tengah ini telah melahirkan karya-karya besar di bidang fikih, tafsir, hadis, dan tasawuf. Citra intelektual dan ekspansi karya sosok-sosok ini bukan hanya sebatas taraf domestik nusantara, tapi juga sampai diakui di kawasan Timur Tengah dan Afrika.

Contoh kongkrit tersebut, hanyalah segelintir tokoh pelaksana lembaga pendidikan Islam (Fatih Rusydi, 2019),

sehingga dengan demikian, kehadiran dan eksistensi lembaga pendidikan Islam tersebut adalah modal yang dapat dijadikan bahan bagi pelaksanaan dan pengembangan lembaga Negera yang bertugas untuk mencetak kader bangsa yang lebih baik dan lebih berkualitas, sehingga dengan demikian, Negara menjadi lebih baik.

Kesimpulan

Sejarah Islam yang sudah berjalan lebih dari lima belas abad lamanya telah memberikan kontribusi dan meninggalkan napak tilas kesejarahan yang mampu dijadikan potret wajah kondisi pendidikan Islam yang sebenarnya, sejarah bukan hanya menggambarkan realitas kenyataan yang telah terjadi dimasa yang sebelumnya, melainkan juga berfungsi sebagai pemandu bagi generasi yang selanjutnya, agar mereka mampu untuk menjadikan pijakan yang lebih baik dari sebelumnya.

Pendidikan Islam di Indonesia, pada dasarnya telah terbentuk seiring dengan datangnya Agama Islam di bumi

nusantara ini, karena salah satu penyebaran Islam di negeri ini adalah salah satunya melalui dunia pendidikan, disamping melalui jalur perdagangan dan perkawinan dengan para putri penguasa atau para raja. Peran dan kiprah pendidikan Islam dalam merebut dan menyatukan bumi nusantara ini menjadi suatu Negara yang saat ini bernama Indonesia tentunya sangatlah banyak. Tidak hanya sampai disitu, kiprah pendidikan Islam dalam mengisi kemerdekaan ini juga masih tetap menunjukkan peranannya.

Sehingga dengan demikian, dalam makalah ini, penulis sedikit menyingkap sejarah pendidikan Islam pada masa orde lama, orde baru dan bahkan pada masa orde reformasi saat ini. Negara mempunyai kekuatan yang sangat besar dalam mengatur dan menjalankan roda pemerintahan, termasuk juga dalam dunia pendidikan Islam. Sehingga, kondisi pendidikan Islam dari masa kemasa mempunyai kedudukan dan bahkan porsi yang sangat berbeda dari pemerintah, yang kemudian akhirnya berimplikasi terhadap hasil dari pelaksanaan pendidikan.

Daftar Pustaka

- Abid Al-Bisri, Munawwir A Fatah, *Kamus Al-Bisri, Indonesia-Arab, Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1999),
- Abuddin Nata, *Sejarah Pendidikan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2011),
- Arief Subhan, *Lembaga Pendidikan Islam Abad ke-20-pergumulan antara modernisasi dan Identitas*, (Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2012),
- Athiyah al-Abbasyi, *Dasar-Dasar Pokok Pemikiran Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974),

- Haidar Putra Daulay, *Pendidikan Islam dalam Sistem Pendidikan Nasional di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2004),
- Husni Rahim, *Arah Baru Pendidikan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Logos wacana Ilmu, 2001),
- Maksum, *Madrasah, Sejarah dan Perkembangannya*, (Jakarta: Wacana Ilmu, 1999),
- Masrukhin. *Metode Penelitian Kualitatif*, (Kudus: Media Ilmu Press, 2015),
- Muhaimin, *Wacana Pengembangan Pendidikan Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003),
- Sjacrhan Basah, *Ilmu Negara Pengantar, Metode dan Sejarah Perkembangan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007),
- Syadzili, Muhamad Fatih Rusydi, F Zulfa, Strategi Merealisasikan Pendidikan Dasar Islam Yang Kompetitif di MI Perwanida Blitar, *Tasyri: Jurnal Tarbiyah-Syariah-Islamiah*, 29 (01) (2022): 29-42
- Syadzili, Muhamad Fatih Rusydi, Kiai Muchtar Syafa'at Dalam Pendidikan Islam Indonesia, *An Nahdhoh Jurnal Kajian Islam Aswaja*, 1 (1) (2021): 41-51
- Syadzili, Muhamad Fatih Rusydi, Model kepemimpinan dan pengembangan potensi pemimpin pendidikan Islam, *Cendekia: Jurnal Studi Keislaman*, 4 (2) (2018): 127-136
- Syadzili, Muhamad Fatih Rusydi, Ontologi Manajemen Pendidikan Islam dalam Konstruksi Al-Qur'an dan Al-Hadits, *Tabyin: Jurnal Pendidikan Islam*, 1 (2) (2019): 87-102
- Syadzili, Muhamad Fatih Rusydi, Polarisasi tahapan kepemimpinan transformatif pendidikan Islam, *Al-Tanzim: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 3 (1) (2019): 55-81
- Tim penyusun KBBI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2000),
- Wahjoetomo, *Pesantren*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1997),